

Pemkab Bekasi Restui Pembangunan MRT Rute Tomang-Medan Satria

BEKASI (IM) - Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto Tjahyono menyampaikan pihaknya mendukung rencana pembangunan MRT Jakarta fase 3 East-West yang melewati rute Tomang, Jakarta Barat-Medan Satria, Kota Bekasi. MRT tersebut mencakup Cikarang, Kabupaten Bekasi-Balaraja, Kabupaten Tangerang sepanjang 84 kilometer.

Adapun pembangunan fase 3 stage 1 dimulai dari Tomang-Medan Satria. "Saya dan Pj Gubernur DKI (Heru Budi Hartono) dan Gubernur Jawa Barat (M Ridwan Kamil) telah menandatangani kesepakatan dengan pihak JICA tentang pembangunan MRT Jakarta di Bekasi," kata Tri saat ditemui di Masjid Agung Al Barkah, Kota Bekasi, kemarin.

Tri berharap, adanya transportasi modern tersebut dapat memudahkan mobilitas masyarakat di Kota Bekasi yang banyak bekerja di Jakarta atau sebaliknya. Terpenting, sambung dia, pembangunan itu dapat mengurangi kemacetan di wilayah yang dipimpinnya. "Saya harap MRT ini dapat mempermudah akses mobilitas dan mengurangi kemacetan yang ada," kata Tri.

Pemprov DKI Jakarta, Pemprov Jabar, dan Pem-

kot Bekasi telah sepakat untuk berkolaborasi dalam pembangunan MRT Jakarta. Hal itu ditandai dengan penandatanganan kesepakatan bersama antara Pj Gubernur Heru Budi Hartono, Gubernur M Ridwan Kamil, dan Plt Wali Kota Tri Adhianto di Gedung Sate, Kota Bandung, Jumat (17/2) lalu.

Proyek pembangunan MRT East-West diperkirakan menelan anggaran sekitar Rp 160 triliun. Jika sudah terbangun, setiap harinya diprediksi MRT tersebut dapat mengangkut hingga 250 ribu orang dari Bekasi ke Jakarta.

Gubernur Ridwan Kamil mengatakan, program tersebut merupakan arahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mulai membangun MRT dari Cikarang, Kabupaten Bekasi menuju Balaraja, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Dia berharap, dengan MRT bisa membuat warga beralih menggunakan transportasi massal.

Adapun MRT Jakarta fase 3 stage 1 memiliki panjang 24,5 kilometer dan stage 2 sepanjang 9,2 km yang mencakup jalur melintasi Tomang, Dukuh Atas, Senen, Perintis, hingga Medan Satria. "Dan nanti 2024 sudah mulai pembangunan," kata Pj Gubernur Heru. ● yan

4 | Metropolis

FOTO: ANT



VAKSINASI PENGUAT KEDUA BAGI PEGAWAI KPU

Tenaga kesehatan menyuntikkan vaksin penguat (booster) kedua COVID-19 kepada pegawai KPU di Gedung KPU, Jakarta, Selasa (21/2). Vaksinasi COVID-19 penguat (booster) itu dilakukan sebagai upaya pencegahan penularan, terutama bagi staf atau pegawai KPU yang kesehariannya bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Jokowi Targetkan Normalisasi Kali Ciliwung Rampung 2024

"Pengerjaan normalisasi Kali Ciliwung yang tersisa sekitar 17 kilometer, bisa rampung akhir 2024. Sehingga akan mengurangi banjir yang biasanya terjadi di Jakarta. Selain normalisasi Kali Ciliwung, pemerintah juga telah membangun Bendungan Ciawi dan juga Sukamahi untuk menahan banjir di DKI Jakarta," kata Presiden Jokowi.

untuk pembebasan lahan baru akan mulai dilakukan pada esok hari. "Sehingga nanti titik-titik yang sudah dibebaskan langsung konstruksinya jalan," lanjut dia.

Proses pembebasan lahan ini dilakukan oleh Menteri ATR/BPN dan juga Gubernur DKI Jakarta. Bagi lahan yang belum memiliki sertifikat, maka akan segera diproses oleh Kementerian ATR/BPN sehingga bisa melanjutkan proses ganti rugi oleh Gubernur DKI Jakarta serta pengerjaan konstruksi.

Jokowi pun menargetkan pengerjaan normalisasi Kali Ciliwung yang tersisa sekitar 17 kilometer ini bisa rampung dalam dua tahun atau akhir 2024. Sehingga akan mengurangi banjir yang biasanya terjadi di Jakarta. Selain normalisasi Kali Ciliwung, pemerintah juga telah membangun Bendungan Ciawi dan juga Sukamahi untuk menahan banjir di DKI Jakarta.

"Kita harapkan, saya berikan target tadi dalam dua tahun artinya akhir 2024 yang 17 kilo (meter) itu insyaallah selesai sehingga normalisasi Sungai Ciliwung betul-betul rampung dan ini akan mengurangi, sangat akan mengurangi yang namanya banjir," jelas Jokowi.

Selain Ciliwung, Jokowi

mengatakan, pemerintah juga akan menormalisasi 12 sungai lainnya yang ada di DKI Jakarta. Kendati demikian, fokus pemerintah saat ini yakni melakukan normalisasi di Kali Ciliwung terlebih dahulu. "Semuanya dimulai, semuanya dimulai, tapi kita akan fokus konsentrasi di Ciliwung," ujar Jokowi. ● yan

Kian Nyaring Keluhan Penumpang Kereta soal Stasiun Manggarai

JAKARTA (IM) - Stasiun Manggarai di jam sibuk seperti berangkat dan pulang kantor sering terjadi penumpukan penumpang. Sementara, Dirut KCI, Suryawan mengatakan pihaknya sudah berupaya maksimal melayani penumpang KRL di Manggarai.

Salah satu pengguna KRL bernama Desca yang setiap hari menggunakan KRL untuk bekerja mengatakan dia mengapresiasi kerja KCI, namun untuk di Manggarai, Desca mengatakan masih belum puas dengan fasilitas di sana. Desca adalah pengguna KRL rute Bogor-Jakarta Kota atau Bogor-Manggarai.

"Saya berterima kasih karena KCI sudah menyediakan layanan KRL bagi saya dan jutaan user commuter lainnya. Tapi khusus untuk Stasiun Manggarai yang ingin dijadikan pusat dari kegiatan KRL Jabodetabek, secara jujur saya mengatakan fasilitasnya masih sangat kurang terutama untuk bolak balik masyarakat atau pengguna dari Bogor ke Tanah Abang maupun dari Bekasi ke Kota," ujar pengguna KRL, Desca, kepada detikcom.

Menurut Desca, lantai atau tangga penghubung maupun eskalator dan alur bolak balik di fasilitas Stasiun Manggarai saat jam sibuk itu kurang memadai. Khususnya untuk lansia, ibu hamil, maupun anak-anak.

"Sebagaimana kita tahu bahwa commuter ini sebagai urat nadinya untuk masyarakat yang bekerja di kawasan Jabodetabek, kalau bapak bekerja dengan urat nadi, dan salah satu nadi bapak juga terganggu pasti akhirnya bikin kesal, dan ingin banget supaya gangguan itu segera diselesaikan, nah itulah yang kami rasakan kalau ternyata di Manggarai itu selalu terjadi penumpukan atau kemacetan lalu lintas perpindahan pengguna commuter," kata Desca.

Desca mengatakan dia menghargai kerja keras KCI. Namun, dia tetap berharap KCI terus bekerja keras dan memperbaiki fasilitas di Manggarai. "Jadi selain saya menghargai kerja keras bapak, dan rekan-rekan di KCI, saya juga berharap bahwa bapak bisa bekerja lebih keras lagi dan serius untuk memperbaiki penumpukan di Stasiun Manggarai tersebut," ucap Desca.

Sementara itu, pengguna KRL lainnya, Aprilandika, mengatakan hal senada. Dia mengatakan penumpukan di Manggarai kerap terjadi saat jam sibuk, karena itu dia berharap sistem di Manggarai diperbaiki.

Dika juga adalah karyawan di Jakarta di kawasan Sudirman. Dia sering naik KRL rute Bogor-Jakarta Kota kemudian transit di Manggarai untuk ke Stasiun Sudirman.

"Kalau melihat kondisi saat ini, terutama saat jam masuk dan pulang kerja peron itu selalu penuh sama hilir pemudik penumpang. Kondisi itu justru menampakkan kalau Stasiun Manggarai tuh memang enggak siap sama tugas barunya, ya baiknya sistem sebelumnya baiknya diberlakukan dulu sementara waktu, sembari KCI memantaskan Manggarai sebagai stasiun transit," kata Dika.

Dia berharap sistem yang lama diterapkan sementara. Sistem lama yang dimaksud adalah di mana, dari Bekasi ada KRL yang langsung ke Jakarta Kota dan di Bogor ada KRL rute Tanah Abang/Duri/Angke-Bogor dan Bogor-Jakarta Kota.

"Memantaskan dalam arti ya membenahi dan memaksimalkan fasilitas yang ada seperti eskalator dan lift misalnya, sehingga ya nggak perlu lagi ada tumpukan penumpang setiap harinya di sana," pintanya.

Hal senada dikatakan pengguna KRL lainnya, Mahardika Yusuf, mengatakan dia belum sepenuhnya puas dengan pelayanan KAL. Hal yang dibelang belum memuaskan adalah sering terjadinya penumpukan penumpang di Stasiun Manggarai tempat dia biasanya transit.

"Dibilang puas sih belum, tapi untuk kinerja walkanya udah oke, mungkin manajemennya masih harus ngasih solusi lagi biar penumpang nggak numpuk gitu, soalnya dempet-dempetan kan kasihan (penumpang), sudah capek kerja tapi masih harus capek di Stasiun Manggarai," kata Yusuf.

Yusuf merupakan penumpang KRL yang transit di Stasiun Manggarai pagi tadi. Dia mengatakan berangkat dari Stasiun Depok, kemudian sampai di Manggarai pukul 07.15 WIB. ● yan



FOTO: ANT

PENGURAIAN SAMPAH ORGANIK DI JAKARTA Petugas Sudin Lingkungan Hidup Jakarta Pusat melakukan pengolahan sampah daun di TPS 3R Ketapang Satpel Lingkungan Hidup Kecamatan Gambir, Jakarta, Selasa (21/2). TPS 3R Ketapang Satpel Lingkungan Hidup Kecamatan Gambir itu dapat mereduksi atau mengurai sampah organik menjadi kompos sebanyak 200-300 kilogram per hari.

Ketua DPRD Bekasi Minta Pemkot Kaji Dulu Penggunaan Panel Surya

BEKASI (IM) - Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto Tjahyono mendorong penggunaan panel surya untuk energi listrik di lingkungan pemerintah kota (pemkot). Merespons hal itu, Ketua DPRD Kota Bekasi, M Saifuddaulah meminta pemkot mengkajinya terlebih dahulu, khususnya terkait efisiensi anggaran.

Saifuddaulah mengaku tidak memperlakukan usulan itu. "Intinya kita tidak permasalahan sepanjang prasarana dan infrastruktur yang ada memenuhi standar terkait dengan penggunaan tenaga surya," kata Saifuddaulah dalam pengeluaaran anggaran APBD Kota Bekasi, kemarin.

Namun, Saifuddaulah mengatakan, Pemkot Bekasi mesti menghitung betul terkait efisiensi anggaran dari penggunaan listrik PLN ke pemanfaatan panel surya. Jangan sampai, kata dia, perubahan itu malah menjadi lebih mahal. "Apakah ini akan lebih hemat dalam pengeluaran anggaran APBD? Karena penggantian ini akan ada cost-nya," kata dia.

Terlebih, menurut Saifuddaulah, pengadaan panel surya itu belum masuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2023 dan rencana kerja. "Saya belum tahu pengadaan panel tenaga surya itu berapa besar anggarannya karena belum masuk di APBD," ujar dia.

Untuk itu, Saifuddaulah

menyarankan pemkot mengkajinya terlebih dahulu sebelum menerapkan penggunaan panel surya. Pemkot, kata dia, mesti tepat sasaran dalam menggunakan APBD. "Prinsipnya, kalau itu bisa efisiensi terkait dengan anggaran. Anggaran harus digunakan kepada yang prioritas," kata Saifuddaulah.

Dorongan penggunaan panel surya sempat disampaikan Plt Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto Tjahyono saat memimpin apel di lapangan utama Gedung Pemkot Bekasi, Senin (6/2) lalu. Ia mengajak jajaran pemnanaan sinar matahari dengan menggunakan panel surya. "Hal seperti itu perlu kita coba," kata dia.

Sebagai percontohan, Tri mengaku akan memulai di rumahnya. "Saya akan coba di rumah bagaimana pembayaran rekening listrik itu bisa berkurang dengan penggunaan sinar matahari (panel surya)," kata Tri.

Menurut Tri, penggunaan panel surya diperkirakan bisa menghemat sekitar 50 persen biaya listrik layanan PLN. Jika ada kerja sama dengan penyedia panel surya, kata dia, pemasangan bisa digratiskan. Untuk pengadaan alatnya, menurut dia, bisa dicicil dari hasil penghematan pembayaran tagihan listrik PLN.

"Semua alat dan penggantian itu gratis oleh provider," ujar dia. ● yan

Pemprov DKI Akan Beli 21 Mobil Listrik pada 2023

JAKARTA (IM) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bakal melakukan pengadaan 21 mobil listrik pada 2023. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD) DKI Jakarta, Reza Pahlevi berujar, dana pengadaan mobil listrik itu dialokasikan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) DKI Jakarta tahun anggaran 2023.

"Tahun ini, (pengadaan) 21 (mobil listrik) dulu," sebutnya saat dikonfirmasi, Selasa (21/2).

"(Pengadaan 21 mobil listrik) menggunakan (APBD DKI) 2023," lanjut dia.

Reza mengakui pengadaan untuk satu mobil listrik tergolong mahal, yakni sekitar Rp800 juta.

Di sisi lain, ia enggan mengungkapkan merek mobil listrik seharga Rp800 juta per unit itu. "Anggarannya gede sekali, hampir Rp800 juta (per unit mobil listrik). (Merek) enggak boleh disebut dong," tuturnya.

Reza menuturkan, sebanyak 21 mobil listrik itu diperuntukkan bagi sejumlah pejabat tinggi di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Antara lain, pejabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, sekretaris daerah (sekda) DKI Jakarta, asisten sekda DKI, inspektur DKI Jakarta, serta kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta.

Ia menambahkan, BPAD DKI Jakarta kini tengah merevisi peraturan

kepala daerah (Perkada) soal pengadaan kendaraan dinas operasional (KDO).

Adapun penggunaan mobil listrik akan tertanam dalam Perkada soal KDO tersebut. Di satu sisi, menurut Reza, kendaraan listrik itu akan dipakai sebagai pengganti KDO milik sejumlah pejabat yang sudah ada. KDO milik sejumlah pejabat itu, sebelum diganti mobil listrik, bakal dilelang oleh Kantor Pelelangan Negara. "Mobil yang dipakai SKPD (satuan kerja perangkat daerah) hari ini sudah habis masa umurnya, tetap nanti akan dilakukan penghapusan. Kemudian dilakukan lelang melalui Kantor Pelelangan Negara," urai dia. ● yan



FOTO: ANT

INSENTIF KENDARAAN LISTRIK

Pengunjung mengamati sepeda motor listrik pada pameran Indonesia Internasional Motor Show (IIMS) di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Senin (20/2). Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif memastikan bahwa insentif untuk kendaraan listrik akan mulai diberikan oleh pemerintah pada Maret mendatang dengan besaran insentif yang diberikan bagi sepeda motor sebesar Rp7 juta per unit.